ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT KEJAHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Derry Angling Kesuma

Sumpah Pemuda School of Law (STIHPADA) Palembang, Indonesia

Email: kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Prevalensi kejahatan di suatu daerah akan menghambat bisnis dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pendapatan suatu daerah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Studi ini menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia antara tahun 2013-2018. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari BPS, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), total investasi, indeks kejahatan umum (CR 1), indeks kejahatan Ekonomi atau korupsi (CR 2) terhadap PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Adapun parameter yang akan dicari dalam penelitian, untuk mengukur indeks kejahatan umum dan kejahatan ekonomi atau korupsi. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa baik penanaman modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kejahatan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Hubungan, Tingkat Kejahatan, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

The prevalence of crime in an area will hinder business and have an effect on increasing poverty and income of an area. The type of research method used is a qualitative method. The data used in this research is secondary data. This study uses panel data from 31 provinces in Indonesia between 2013-2018. Secondary data collection was obtained from BPS, namely the Human Development Index (IPM), total investment, general crime index (CR 1), Economic crime or corruption index (CR 2) to GRDP to measure economic growth. The parameters that will be sought in the study are to measure the general crime index and economic crime or corruption. From the research results, it can be seen that both investment has a positive effect on economic growth. On the other hand, crime has a negative impact on regional economic growth.

Keywords: Relationship, Crime Rate, Economic Growth.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan mendasar dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian untuk jangka waktu yang panjang merupakan prasyarat bagi proses pengentasan kemiskinan, hal tersebut memungkinkan terciptanya peluang kerja. Pekerjaan yang dihasilkan meningkatkan sumber pendapatan negara yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi telah memungkinkan dunia modern untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat negara secara umum (Adiyanta, 2018). Tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan dasar lintasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjamin lingkungan yang cocok untuk investasi (Akhmaddhian, 2016).

Para ekonom aliran Klasik berpendapat bahwa individu memiliki kehendak bebas dan memilih untuk melakukan kejahatan berdasarkan alasan dan keputusan mencari kesenangan. Mereka menimbang potensi biaya dan manfaat dari pelanggaran, dan mereka akan memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalkan rasa sakit mereka (Akhmaddhian, 2017). Di sisi lain, para ekonom kontemporer memandang bahwa orang tidak bebas memilih perilaku mereka, tetapi perilaku mereka ditentukan oleh faktor-faktor di luar kehendak bebas mereka seperti genetika, pekerjaan, pola asuh, ekonomi dan sosial (Busroh, 2017). Selain itu, juga menghambat penciptaan dan pemeliharaan ekonomi negara yang maju yang akan membebaskan dana besar untuk sektor publik dan juga swasta, yang akan merugikan kesejahteraan pribadi, serta masyarakat secara umum (Butar, 2015).

Meskipun jumlah investasi yang cukup dalam upaya untuk pembuatan kebijakan daerah berpengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun situasi pemerintahan, politik, dan hukum juga memiliki kepentingan dan pengaruh sendiri. Situasi hukum dan ketertiban yang buruk dan kejahatan menciptakan keresahan dalam perekonomian. Kejahatan meningkatkan ketidakpastian dalam masyarakat (Herlambang, 2019). Kejahatan adalah fenomena yang tidak dapat diterima dalam masyarakat beradab mana pun. Setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang serta berpotensi mengganggu ketertiban umum, dapat dikategorikan kejahatan dan berpotensi mendapat hukum pidana. Kejahatan adalah sumber utama ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Indonesia adalah negara yang menghadapi potensi konflik sipil, kriminalitas tingkat tinggi, penyalahgunaan narkoba, pemindahan paksa, dan penculikan, ini semua adalah hal yang umum dan banyak ditemukan di negara berkembang. Konsep kriminalitas cukup luas, dan tidak mungkin untuk mendefinisikannya secara sederhana. Konsep ini terkait dengan pembunuhan, kejahatan jalanan, penculikan, pencurian, pembunuhan, perdagangan narkoba, kejahatan terhadap properti, atau campuran dari semua tindakan ini. Kejahatan merupakan masalah serius yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Para ekonom berpendapat bahwa kejahatan berbahaya bagi pembangunan ekonomi negara (Juliati, 2015).

Kejahatan dikaitkan dengan uang dan penerimaan perilaku melanggar hukum. Kejahatan menghambat kegiatan ekonomi dan karenanya merupakan penghalang bagi pembangunan negara (Khairani, 2019). Kejahatan berdampak negatif terhadap akumulasi modal fisik, manusia, dan sosial. Ini meningkatkan biaya produksi karena pengeluaran kejahatan untuk premi asuransi dan keamanan swasta meningkat (Karlina, 2017). Kejahatan juga merusak infrastruktur sosial masyarakat, serta meningkatkan ketakutan yang ditimbulkan oleh penjahat dan dapat mempengaruhi produktivitas ketika bisnis/perusahaan di suatu daerah (Kewal, 2012). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dengan menyusun kebijakan sosial yang efisien untuk mengurangi efek kejahatan pada masyarakat. Ini telah menjadi tujuan bersama dari badan-badan pemerintahan (Kusmayadi & Qomari, 2019). Identifikasi faktor-faktor penentu kejahatan merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Masa ketika ekonomi suatu daerah sedang sulit, pasti mendorong lebih banyak orang untuk melakukan tindak kejahatan, dan terkadang menyebabkan lebih banyak kejahatan seperti perampokan karena penjahat mencuri barang yang menjadi kebutuhan primer yang tidak mampu dibeli. Selain itu, masa ekonomi yang buruk mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan konsumsi yang lebih besar zat adiktif yang dapat mempengaruhi pikiran

seperti narkoba, yang mengarah ke lebih banyak kekerasan secara umum dan, sebagai imbalannya, tingkat kejahatan akan meningkat. Hal ini mempengaruhi pemerintah dalam hal menghabiskan dana untuk menyelidiki, menangkap dan menghukum penjahat atau membantu memperbaiki kerusakan akibat kegiatan kriminal, tetapi juga dalam hal keselamatan pribadi, integritas, dan kebahagiaan. Kejahatan juga menyebabkan trauma; bekas luka fisik, emosional, ekonomi, dan psikologis.

B. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Pengumpulan data berasal dari data panel yang terdiri dari 31 provinsi di Indonesia antara tahun 2013-2018. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), total investasi, indeks kejahatan umum (CR 1), indeks kejahatan Ekonomi atau korupsi (CR 2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun parameter yang akan dicari dalam penelitian, untuk mengukur indeks kejahatan umum dan kejahatan ekonomi atau korupsi mengikuti persamaan berikut: $CR1 = \text{Populasi } 100\%$; $CR2 = \text{Populasi Kejahatan}$

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia mewakili tingkat teknologi yang melekat pada manusia, dimana unsur-unsur perhitungan IPM menurut Badan Pusat Statistik terdiri dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah pada parameter 1, 2, 3, 4 memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. INV yaitu investasi (baik dari dalam negeri maupun luar negeri). Persamaan diatas akan diuji dalam pengolahan data dengan 3 model dimana INV akan dibagi menjadi 2 variabel yaitu INV1 (PMA/FDI) dan INV2 atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Investasi Langsung di Indonesia

Investasi langsung merupakan investasi yang membutuhkan kehadiran investor dengan cara mendirikan perusahaan. Mendirikan perusahaan berarti investor membutuhkan lahan untuk itu, baik untuk industri (pabrik, perkantoran, dan lain-lain) maupun usaha perkebunan dan usaha lainnya (Manan, 2014). Oleh karena itu, pengaturan hak atas tanah di Indonesia harus ditetapkan. Indonesia telah membuat peraturan tentang penanaman modal langsung sejak tahun 1960 dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) (Muklis, 2016). Salah satu tujuan dibentuknya UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka IV alinea pertama dan kedua UUPA bahwa badan-badan usaha yang mengarah pada kepastian hak atas tanah sebenarnya berasal dari beberapa pasal yang mengatur tentang tanah. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada pemerintah sebagai pemegang instruksi sekaligus pengawas, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

“..dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti persamaan hak bagi setiap orang di depan pengadilan. Aspek kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi undang-undang,

karena isi undang-undang itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.”

Hukum harus dapat berfungsi menjadi peraturan yang harus ditaati agar seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Artinya dengan berfungsinya hukum sebagai peraturan yang harus ditaati, investor yang telah menanamkan modalnya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk badan hukum asing atau perusahaan multinasional yang menanam modal di Indonesia, baik yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, maupun peternakan, dapat memiliki hak atas tanah untuk usahanya, dan penanam modal yang bergerak di bidang industri (pabrik) dan seperti dapat memiliki hak atas tanah berupa hak guna bangunan (Suliswanto, 2010). Selain itu, orang asing dan badan hukum asing juga dapat memiliki hak atas tanah berupa hak pakai dan sewa bangunan.

Tujuan utama dari sebuah investasi adalah untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, motif investasi adalah pendapatan. Pendapatan yang dimaksud tentunya adalah keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu investasi berdasarkan perhitungan bisnis. Pertama, investasi berarti membeli saham atau obligasi, jika analisis dilakukan maka akan memastikan modal yang ditanam dan memberikan *return* yang baik. Berbagai faktor tersebut yang membedakan investasi dari spekulasi. Hal kedua yaitu teori investasi berarti pembelian alat-alat produksi (termasuk barang-barang untuk dijual) dengan modal berupa uang yang ditanam dalam perusahaan di suatu daerah (Putralie, 2011)..

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, khususnya pengertian-pengertian yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 UU Pasar Modal, dapat ditentukan bahwa penanam modal diperlukan lebih banyak investasi dengan cara melakukan atau mendirikan suatu usaha baru. Investasi semacam itu disebut investasi langsung. Penanaman modal bisa dilakukan oleh perorangan atau suatu badan usaha, atau perusahaan, baik WNI ataupun WNA. Demikian pula perusahaan yang melakukan investasi adalah perusahaan nasional atau perusahaan multi nasional yang berinvestasi di Indonesia.

Gambar 1. Rata-Rata Angka Kejahatan di Indonesia

Sumber: BPS (2018)

Indonesia yang tumbuh dengan keragaman manusia dan sumber daya alamnya membuat karakter ekonominya berbeda dengan negara lain. Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Rata-rata, tingkat pertumbuhan kejahatan di

Indonesia di bawah 1%, meskipun jumlah kejahatan telah menurun dalam beberapa tahun. Tingginya tingkat kriminalitas dapat dipicu oleh beberapa hal, antara lain pengangguran, tingkat kemiskinan, kebutuhan akan sumber pangan.

PLS merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana dampak kejahatan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data dikumpulkan dari 31 provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan antara 2010 dan 2018. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2. Index Pembangunan Manusia

Sumber: BPS (2018)

Kualitas sumber daya manusia sebagai ukuran kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses hasil dari pembangunan untuk memperoleh pendapatan, akses kesehatan, serta akses pendidikan tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM terdapat 3 parameter utama, yaitu 1) Indeks kesehatan yang mencerminkan kualitas dan harapan hidup masyarakat Indonesia; 2) Indeks pendidikan yang terdiri dari indeks harapan jangka panjang sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah; dan 3) Indeks Pengeluaran merupakan informasi tentang besarnya pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia. Secara umum, nilai IPM di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan antara tahun 2010 hingga 2018. Rata-rata kenaikan IPM tidak lebih dari 1%, hanya pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 18,24%.

Hasil analisis menggunakan PLS menunjukkan bahwa FDI memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh investasi. Investasi merupakan salah satu tulang punggung dalam meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan investasi di sektor industri dapat menekan biaya pokok dan biaya variabel sehingga jumlah output yang dihasilkan meningkat dan dapat menurunkan harga yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Investasi pada pemerintah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempercepat perekonomian (Suliswanto, 2010).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi; peningkatan belanja pemerintah di daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sangat strategis untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke unit-unit daerah. Hingga triwulan II 2018, nilai PDB di Indonesia mencapai Rp2.603.748 miliar, dengan dominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54%.

Gambar 3. Nilai PDB dan Konsumsi Rumah Tangga (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: BPS (2018)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi, peningkatan belanja pemerintah di daerah akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sangat strategis untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke unit-unit daerah. Hingga triwulan II 2018, nilai PDB di Indonesia mencapai Rp2.604.748 miliar, dengan dominasi pengeluaran konsumsi sebesar 54%.

Tingkat konsumsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan dalam sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan masyarakat adalah dari hasil kerja dan investasi. Perusahaan yang mencari faktor *input* produksi seperti tenaga kerja tentunya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yang terpenting adalah kualitas sumber daya dan kebutuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi permintaan terhadap output yang dihasilkan perusahaan maka kebutuhan akan tenaga kerja akan semakin meningkat sehingga imbal hasil masyarakat akan semakin besar (Wulandari, Wahyuni & Edy, 2017). Sedangkan faktor *input* produksi yang dibutuhkan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa antara lain investasi. Investasi pada perusahaan yang memproduksi di Indonesia yang salah satunya berasal dari masyarakat dapat berupa penyertaan langsung antara rumah tangga dengan perusahaan atau melalui lembaga keuangan seperti bank yang berfungsi sebagai penyalur masyarakat yang kelebihan dana perusahaan yang membutuhkan investasi.

Tabel 2. Hasil pengolahan data menggunakan *Pooled Least Square*

Dependent Var. Ln (GRDP)	Model 1	Model 2	Model 3
Regressor			
IPM	0,004905 [1.39146]	0,003825 [0,96133]	0,007807 *** [1,882259]
RAK	0,000160 *[6,45438]		0,000252 * [10,95075]
PDRB	2,99E-06 * [7,83297]	4,36E-06 * [12.1577]	
CR1	-0,084227 ** [-2.52460]	-0,088374 ** [-2,34977]	-0,098686 * [-2,498565]
CR2	-117,5938 *** [-1,759792]	-158,9069 ** [-2,10687]	-181,3392 ** [-2,294,122]

ARTIKEL

C	4,599259 * [18.9110]	4.749974 * [17,40401]	4,490338 * [15,61722]
R-Square	0,657697	0,561995	0,516779
F-Test	57,25715	48,11528	40,10405
Prob. F	0,000000	0,000000	0,000000
Keterangan: tergantung Var. Ln (PDRB) total panel (berimbang) observasi 155. * (sig level 1%) ** (sig level 5%) *** (sig level 10%)			

IPM pada model 1 menunjukkan nilai koefisien 0,004905 positif dan tidak signifikan. Peningkatan kualitas manusia yang tercermin dalam IPM tidak dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, SDM yang terdidik dan terlatih dapat berdampak besar pada peningkatan kinerja perusahaan, yang dapat berdampak pada pendapatan masyarakat, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi investasi di Indonesia tidak merata di setiap provinsi, dan konsentrasi tertinggi berada di provinsi-provinsi di pulau Jawa.

Kejahatan pada umumnya dapat mengganggu kegiatan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Hasil pada model 1 menunjukkan korelasi negatif antara kejahatan umum yang diwakili oleh CR1 terhadap PDRB. Demikian pula kejahatan ekonomi yang diwakili oleh jumlah tindak pidana korupsi dengan variabel CR2 menghasilkan hubungan negatif terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kejahatan umum atau khusus seperti korupsi akan menurunkan tingkat PDRB, yang kemudian akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peran pemerintah dalam mengurangi tingkat kejahatan umum sangat diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif bagi kegiatan ekonomi. Tindak pidana umum terbatas pada tindak pidana dan kegiatan pungutan liar yang dapat meningkatkan biaya tidak terduga bagi pelaku kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam menekan tingkat kriminalitas dan pungutan liar akan menurunkan biaya sosial yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kejahatan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan setiap kejahatan umum atau khusus seperti korupsi akan menurunkan tingkat PDRB, yang selanjutnya dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam memerangi kejahatan publik dan kejahatan keuangan seperti korupsi sangat penting. Kejahatan tersebut akan meningkatkan biaya sosial yang akan menjadi beban anggaran pemerintah dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu adanya sinergi dalam pemberantasan tindak pidana di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2018). Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 240-258.

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Akhmaddhian, S. (2017). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 43-53.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227-250.
- Butar, S. B. (2015). Dampak Kualitas Laporan Keuangan, Regulasi Pengendalian Internal dan Keterbatasan Keuangan Terhadap Inefisiensi Investasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 57-70.
- Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1).
- Juliati, Y. S. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.
- Karlina, B. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 6(1), 16-27.
- Kewal, S. S. (2012). Pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan. *Jurnal ekonomia*, 8(1), 53-64.
- Khairani, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *JEpa*, 4(2), 99-110.
- Kusmayadi, R. C. R., & Qomari, N. (2019). Identifikasi Regulasi Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja di Kabupaten Malang: Sebuah Perspektif Syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 207-234.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(1), 65-76.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi-QU*, 9(2).
- Putralie, E. M., Syahputra, Y. A., & Zul, M. (2011). Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 26-36.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366.
- Wulandari, I. G. A. A. D., Wahyuni, M. A., & Edy Sujana, S. E. (2017). Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Tax Amnesty (Event Study Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).